

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Luluo dapat dikatakan baik.

perencanaan pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah Cukup baik. Perencanaan RPJM dan RKP Desa sudah direncanakan dan sudah disesuaikan dengan dana yang ada. Perencanaan dilaksanakan oleh Kepala desa dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya, sebelum disetujui oleh ketua BPD perencanaan RPJM, RKP Desa dan Raperdes terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah desa lainnya dan masyarakat Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah baik, semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, semua kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan. Tetapi, pemerintah Desa Luluo dalam hal ini kaur keuangan Desa Luluo mengalami kendala khususnya dalam kelengkapan bukti pengeluaran kas dan keterlambatan penyetoran pajak.

penatausahaan pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Luluo sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan tutup buku setiap akhir bulan serta laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kaur keuangan Desa Luluo yang diverifikasi oleh sekertaris desa.

Pelaporan pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Luluo untuk semester pertama dilakukan pada minggu ke tiga bulan Juli dan untuk semester

akhir disampaikan pada bulan Desember 2015. Laporan APBDes disampaikan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo melalui Camat Biluhu. Selain dilaporkan kepada Bupati laporan pengelolaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat Desa Luluo.

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah dilakukan dengan baik, selain dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun, kaur keuangan Desa Luluo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap akhir bulan yaitu setiap tanggal 30. Selain itu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap tahunnya disampaikan kepada masyarakat melalui BPD serta menggunakan papan pengumuman yang ada di halaman kantor Desa Luluo.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes Desa Luluo selama ini sudah dapat dikatakan baik. Namun, kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan jumlah tim pembina dan pengawas hanya sedikit dan pelaksanaannya dilakukan sebulan sekali. Selain pengawasan dari pemerintah daerah pengawasan keuangan desa diusahakan agar melibatkan masyarakat baik dalam menerima, mengelola, dan melaksanakannya.

Dalam hal pembangunan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasi. Untuk pembangunan yang dilaksanakan di Desa Luluo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan penggunaan anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat Desa Luluo dalam setiap kegiatan pembangunan.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Luluo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa Luluo telah melaksanakan pengelolaan APBDes dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala diantaranya adalah keterlambatan pembayaran pajak dan kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Untuk pembangunan yang dilaksanakan di Desa Luluo setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut belum begitu signifikan. Hal utama yang mempengaruhi Peningkatan tersebut adalah penggunaan anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat Desa Luluo dalam setiap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah Desa Luluo melakukan pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan, dan untuk Pemerintah Daerah agar perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada aparat pemerintah Desa Luluo agar pemerintah Desa Luluo bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dinar Aji Atmaja. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)". <http://eprints.ums.ac.id/42652/29/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>(diakses21/07/2016).
- Faridah. 2015. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)". <http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/817/774>(diakses10/03/2016).
- Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kiki Debi Sintia.2016. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". <http://etheses.uin-Malang.ac.id/2813/1/12520065.pdf> (diakses19/10/2016)
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mosii, Sjafrudin. 2015. *Suplemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: Auditorat utama keuangan negara VI BPK RI.
- 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: Auditorat utama keuangan negara VI BPK RI.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurliana. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara". [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal%20Skripsi%20NURLIANA%20\(09-04-13-01-54-01\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal%20Skripsi%20NURLIANA%20(09-04-13-01-54-01).pdf)(diakses21/07/2016).
- Okta Rosalinda LPD. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten

Jombang)”. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewfile/1209/1116>(diakses10/03/2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang STOK Pemerintah desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Gorontalo No. 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Bupati Gorontalo No. 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Puspawijaya Adrian, Musikal Remon, Julia Dwi Nuritha Siregar, R.B. Bely Dj. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. BPKP.

Rizal Bawias, Masje Pangkey, Arie Rorong. 2015. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud”. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewfile/9936/9521>(diakses10/03/2016).

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sjamsuddin Indradi, Sjamsiar.2010. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik*. Malang: AgritekYPN Malang.

Sri Haryanto, Eko. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

----- Eko. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Supriyadi. 2009. "Evaluasi Sistem Keuangan desa kabupaten Sragen (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmalang)". <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/12345/mjy5ty=/Evaluasi-Sistem-Keuangan-Desa-Kabupaten-Sragen-Studi-Kasus-Di-Kecamatan-Karangmalang-Abstrak.pdf> (diakses 23/10/2016)
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.